



2022

Perjanjian Kinerja

PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

JL. Laksamana Yos Sudarso No. 49 A
Watampone, Sulawesi Selatan, 92716

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
NO. W20-A2/2b/OT.01.1/I/2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. NUR ALAM SYAF, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Watampone

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : DR. Drs. H. ABU HURAERAH, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bone, 3 Januari 2022

Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar



DR. Drs. H. ABU HURAERAH, S.H., M.H.
NIP. 195512311982031397

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Agama Watampone



Dra. NUR ALAM SYAF, S.H., M.H.
NIP. 196707301993032006

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
NO. W20-A2/2b/OT.01.1/I/2022
Pengadilan Agama Watampone

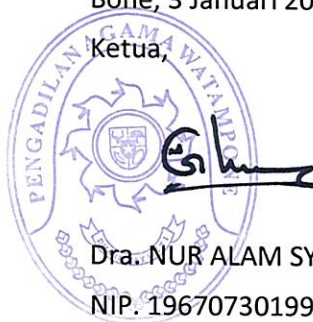
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan.	100
		Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu.	91
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.	95
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.	98
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali.	99
		Index Kepuasan Pencari Keadilan.	85
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu.	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi.	3
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu.	100
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam	100

		Waktu 1 Hari Setelah Putus.	
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan.	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
		Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100

	Kegiatan		Anggaran
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp.	12.346.156.000
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp.	118.000.000
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp.	222.553.000

Bone, 3 Januari 2022

Ketua,



Dra. NUR ALAM SYAF, S.H., M.H.

NIP. 196707301993032006